BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan suatu negara adalah dengan memperhatikan pembangunan ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus mengutamakan tercapainya kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi. Dengan ini masyarakat diharapkan untuk dapat mengikuti setiap pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dan penurunan yang begitu pesat sewaktu-waktu, dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara dan salah satunya dari sektor pajak.

Tercapainya pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari adanya campur tangan perpajakan di dalamnya, terutama dalam penerimaan pajak di Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2022, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun (114,0 persen) dari target APBN Perpres 98/2022, tumbuh sebesar 31,4 persen dari tahun ke tahun. Berbeda dengan tahun 2022, realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2023 sebesar Rp2.155,42 triliun (101,75 persen) dari target pada Perpres 75/2023, tumbuh 5,94 persen dari target awal penerimaan APBN dari penerimaan perpajakan tahun 2023. Itu artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (kemenkeu.go.id, 2023).

Perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari segala macam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Laba menjadi salah satu faktor penunjang tingkat keberhasilan bagi perusahaan (Masmuah, 2023). Dengan begitu pihak perusahaan berusaha mengefisiensikan tingkat sumber daya dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan, terutama beban pajak perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar kepada negara atas pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang sifatnya wajib sesuai ketentuan Undang-Undang, pajak tersebut tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi keperluan negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat.

Pajak sebagai kewajiban perusahaan yang menjadi salah satu faktor pengurang laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin tinggi perusahaan mendapatkan keuntungan, maka pajak yang perlu dikeluarkan perusahaan juga akan semakin bertambah sesuai dengan besaran persentase dari aturan yang berlaku. Karena alasan tersebut, banyak perusahaan berupaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Laporan keuangan, terutama laporan laba rugi menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dalam menjalankan aktivitas

perpajakannya. Sistem akuntansi atau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan maupun yang berdasarkan ketentuan Perpajakan, yang mana keduanya secara umum mengatur tentang pengukuran penghasilan, yaitu sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen (Rama, 2019).

Ukuran standar dan penilaian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal berbeda. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing laporan bertujuan untuk memenuhi kepentingan yang berbeda, jika laporan keuangan komersial ingin memaksimalkan pendapatan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, sedangkan dari sudut pandang laporan keuangan fiskal berusaha meminimalkan beban pajak terutang dari penghasilan yang diperoleh. *Book tax differences* terbentuk karena disebabkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Timbulnya perbedaan permanen disebabkan adanya pengakuan yang diakui menurut Standar Akuntansi Keuangan, tetapi tidak diakui menurut fiskal. Sedangkan perbedaan temporer timbul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Karena kedua komponen inilah, penyebab munculnya perbedaan antara laba akuntansi (penghasilan sebelum pajak) dengan laba fiskal (penghasilan kena pajak) yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung besaran laba yang menjadi dasar pengenaan pajak, laporan keuangan ini harus disesuaikan berdasarkan peraturan perpajakan. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian dengan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk memenuhi pelaporan perpajakannya.

Menurut Zulfi (2023) koreksi fiskal adalah suatu aktivitas didalam proses penyesuaian atau pembetulan yang dilakukan Wajib Pajak. Langkah tersebut dilakukan oleh seorang Wajib Pajak yang mencocokkan laporan keuangannya, apabila terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal ialah melakukan penyesuaian terhadap penghasilan dari Wajib Pajak dan juga pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan perpajakannya.

Rincian biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak telah diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan. Biaya tersebut harus masuk kedalam kategori biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU HPP. Dari hal ini biaya yang merupakan pengeluaran selain untuk kepentingan sesuai Pasal 6 (1) dan termasuk kerugian tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, hal yang akan terjadi apabila banyaknya biaya yang tidak dapat dibiayakan, maka pada laba akuntansi akan lebih kecil daripada penghasilan kena pajak. Dengan demikian, alasan penulis melakukan penelitian pada perusahaan ini adalah karena, apabila dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang dijadikan subjek penelitian, terdapat selisih laba kena pajak antara laba komersial dengan laba fiskal.

Berikut ini merupakan data laporan laba (rugi) yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak:

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Tahun 2022-2023
(dalam rupiah)

Tahun	Laba (Rugi) Komersial	Laba (Rugi) Fiskal
2022	435.052.049.776	527.748.830.174
2023	(112.759.990.825)	(7.059.175.177)

Sumber data: Laporan Keuangan PT Trikonsel Oke Tbk

Berdasarkan data laporan keuangan di atas, ditemukan perbedaan antara laba rugi komersial dan laba rugi fiskal. Dari perbedaan tersebut karena adanya beberapa biaya menurut akuntansi bisa dijadikan beban atau pengurang, namun menurut peraturan perpajakan tidak diakui sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian harus dilakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dari permasalahan ini penulis melakukan analisis atas koreksi fiskal sebagai bahan penelitian untuk menemukan penyelesaian yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebelum menentukan hasil Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan hasil penelitian Nurfia (2021), dengan judul Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Perhitungan PPh Badan PT Dwi Pratama Mandiri adalah setelah dilakukannya rekonsiliasi atas laporan keuangan perusahaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengakuan, sehingga dapat menentukan perhitungan pajak penghasilan badan dari laporan laba rugi fiskal.

Sedangkan hasil penelitian dari Rullia (2022), yang berjudul Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020 adalah setelah dilakukannya penyesuaian rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal dengan selisih sebesar Rp231.501 juta antara laba komersial dengan laba fiskal karena perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Perhitungan penyesuaian atas rekonsiliasi fiskal atau koreksi atas laporan keuangan perusahaan berdampak pada aset pajak tangguhan yang sudah dicatat dalam laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan di PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2022-2023”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari interpretasi yang dijelaskan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah berdasarkan adanya perbedaan unsur pendapatan dan juga biaya yang diakui berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun pajak penelitian.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Koreksi Fiskal Pada PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan?
2. Bagaimana perhitungan PPh terutang PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan setelah dilakukannya koreksi fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan?
3. Apakah PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan PPh Badan yang terutang sesuai ketentuan perpajakan tahun 2022-2023 jika dilihat berdasarkan laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Dari maksud penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman penulis secara luas dari diperolehnya data serta informasi untuk menganalisis variabel yang diteliti yaitu menganalisis koreksi fiskal terhadap perhitungan pajak penghasilan badan, sehingga dapat memperoleh pemecahan masalah yang terbaik dalam urusan perpajakannya bagi Wajib Pajak, khususnya pelaku usaha di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah penerapan rekonsiliasi fiskal PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan.
2. Untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan berdasarkan tarif yang berlaku di tahun penelitian.
3. Untuk mengetahui apakah PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan jika dilihat berdasarkan laporan laba/rugi komersial maupun laporan laba/rugi fiskal yang diperoleh perusahaan tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

- a. Bagi penulis, sebagai media untuk mengaplikasikan pemikiran serta ilmu yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan dan dikembangkan melalui proses pengolahan data informasi dari objek penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bermanfaat.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai media referensi dan menambah pengetahuan pembaca dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai topik yang menjadi bahan penelitian.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari aktivitas yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat serta pengembangan bagi pihak perusahaan, investor dan calon investor maupun pihak lainnya sebagai bahan pertimbangan pada saat memecahkan permasalahan dalam urusan perpajakannya, terutama dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan yang terutang. Hal ini menjadikan perusahaan untuk bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam pemecahan masalah.